

PIDATO MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PADA PENYAMPAIAN PENGANTAR DAN KETERANGAN PEMERINTAH ATAS KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN ANGGARAN 2017

DI DEPAN RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 20 Mei 2016



Bismillaahirrahmaanirrahiim, Assalammu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang Saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya, pada hari ini kita bisa menghadiri Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kami atas nama Pemerintah, mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Dewan, yang telah memberikan kesempatan kepada kami, untuk menyampaikan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2017.

Penyusunan dokumen KEM dan PPKF ini telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program-program pembangunan yang tertuang dalam tema RKP 2017, yaitu: "Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah". Dokumen KEM-PPKF Tahun 2017 akan menjadi acuan bagi Pemerintah dan DPR dalam rangka pembicaraan pendahuluan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017.

Selanjutnya kami sangat mengharapkan pembahasan dan masukan dari para anggota Dewan dalam pembahasan atas materi KEM dan PPKF 2017 ini, untuk menyempurnakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2017.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Selain berlandaskan pada RKP 2017, penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2017 juga senantiasa memperhatikan berbagai perkembangan terkini kinerja perekonomian dan keuangan, baik global maupun domestik.

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi global masih menunjukkan kinerja yang melambat, sebagai akibat dari proses pemulihan di negara-negara maju yang belum optimal, serta perlambatan ekonomi di beberapa negara berkembang. Hal ini berakibat pada masih lemahnya aktivitas perdagangan dunia serta harga-harga komoditas internasional. Di samping itu, terdapat ketidakpastian kebijakan keuangan di negara-negara maju, yang mana sebagian negara menerapkan kebijakan *quantitative easing* sedangkan yang lain menerapkan kebijakan ekonomi ketat.

Perlambatan ekonomi global dan volume perdagangan dunia, terutama negara-negara mitra dagang utama Indonesia, berdampak terhadap perlambatan kinerja perekonomian nasional. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih baik dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara-negara lain. Selain itu, indikator ekonomi makro lainnya juga menunjukkan perkembangan yang relatif stabil. Sementara itu, dengan meningkatnya realisasi investasi langsung, menunjukkan Indonesia masih memiliki daya tarik yang tinggi bagi investor asing maupun domestik.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Seperti kita ketahui bersama, pencapaian realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2016 cukup menggembirakan, yaitu sebesar 4,9 persen. Pencapaian ini didukung oleh masih stabilnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Sementara itu,

dorongan utama pertumbuhan ekonomi pada kuartal ini berasal dari peningkatan pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), sejalan dengan peningkatan belanja infrastruktur pemerintah. Realokasi belanja pemerintah ke arah belanja yang lebih produktif, yaitu belanja infrastruktur telah memberikan dampak positif yang cukup signifikan bagi kinerja investasi. Berbekal dengan pencapaian pada kuartal I 2016 ini, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun berikutnya diharapkan mampu bangkit kembali.

Meskipun perekonomian global pada tahun 2017 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan tahun 2016, pemerintah masih tetap memperhatikan berbagai tantangan dan potensi risiko yang dapat mengganggu kinerja perekonomian nasional. Dari sisi eksternal, belum pulihnya perekonomian global yang diiringi masih rendahnya harga komoditas global, juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis komoditas. Stabilnya kondisi ekonomi makro serta berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah diharapkan dapat mendorong terjaganya tingkat kepercayaan investor.

Sementara itu dari sisi domestik, beberapa tantangan masih perlu untuk terus diperhatikan, antara lain: kapasitas produksi nasional yang masih terbatas, kurang optimalnya daya dukung infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM), masih relatif rendahnya tingkat inovasi dan penerapan teknologi di Indonesia, serta isu terkait kesenjangan ekonomi dan kedaulatan pangan. Dari sisi pembiayaan, perlunya peningkatan peran sektor keuangan dalam negeri serta permasalahan tingginya ongkos pembiayaan (cost of fund).

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Sebelum kami menyampaikan lebih lanjut mengenai Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2017, izinkan kami terlebih dahulu untuk menyampaikan gambaran umum asumsi dasar ekonomi makro tahun anggaran 2017. Gambaran umum asumsi dasar ekonomi makro ini didasarkan pada dinamika terkini perekonomian, baik global maupun domestik, serta prospek ekonomi nasional ke depan.

Sejalan dengan pemulihan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun 2016. Keberlanjutan pembangunan infrastruktur domestik, yang telah dimulai sejak tahun 2015, diharapkan menjadi motor pendorong perekonomian nasional. Peningkatan anggaran infrastruktur ditujukan untuk mendorong investasi dan menjaga daya beli masyarakat. Perbaikan investasi dapat dicapai melalui pengembangan kapasitas produksi dan daya saing. Sementara itu, upaya menjaga daya beli masyarakat dilakukan melalui penguatan konektivitas nasional, sehingga mampu menciptakan efisiensi sistem logistik. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada, pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan mencapai kisaran 5,3–5,9 persen.

Selanjutnya, langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, terutama bahan pangan pokok dan energi, menjadi kunci pelaksanaan program-program pengendalian inflasi. Oleh karena itu, koordinasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil yang semakin baik merupakan modal kuat untuk terciptanya tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Koordinasi yang semakin baik turut didukung oleh semakin meningkatnya kesadaran pemerintah daerah dalam upaya pengendalian inflasi. Dengan memperhatikan beberapa faktor tersebut, maka **inflasi tahun 2017** diperkirakan bergerak pada kisaran **4,0 ± 1,0 persen**.

Berkenaan dengan stabilitas nilati tukar, pergerakan rata-rata **nilai tukar rupiah** terhadap dolar AS tahun 2017, diperkirakan akan bergerak pada kisaran **Rp13.650–13.900 per dolar AS**. Perkiraan tersebut telah mempertimbangkan berbagai risiko yang berpotensi memberikan tekanan

terhadap pergerakan nilai tukar rupiah pada tahun 2017, baik yang berasal dari eksternal maupun domestik. Membaiknya kondisi fundamental ekonomi serta komitmen Pemerintah dalam memberikan kemudahan investasi, diharapkan dapat menjadi insentif baru bagi arus investasi asing ke Indonesia, yang dapat mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Di tahun 2017, permintaan minyak diperkirakan akan meningkat yang disebabkan oleh peningkatan kebutuhan energi dalam rangka pemulihan ekonomi global. Di sisi lain, kenaikan permintaan tidak disertai oleh tambahan pasokan minyak dunia, baik dari Negara-negara OPEC maupun non-OPEC. Berdasarkan perkembangan di atas dan pola historis harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) yang bergerak searah dengan pergerakan harga minyak dunia, rata-rata harga ICP diperkirakan berada pada kisaran US\$35–45 per barel.

Sementara itu, *lifting* minyak dan gas bumi pada tahun 2017 diperkirakan mencapai sekitar 1.790–1.910 ribu barel per hari (bph), yang terdiri dari *lifting* minyak bumi sekitar 740–760 ribu bph dan gas bumi sekitar 1.050–1.150 ribu barel setara minyak per hari (bsmph). Relatif menurunnya *lifting* tersebut, diantaranya, disebabkan oleh penurunan produksi secara alamiah lapangan-lapangan migas utama di Indonesia. Selain itu, investasi untuk kegiatan eksplorasi migas terkendala dengan harga minyak yang masih rendah.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Selanjutnya, izinkan kami untuk menyampaikan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2017. Tahun 2017 merupakan tahun ke-3 pelaksanaan RPJMN 2015 - 2019. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga prinsip keselarasan, keterpaduan serta kesinambungan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan ekonomi, baik sasaran antara maupun sasaran-sasaran jangka menengah panjang sebagaimana telah

ditetapkan, maka penyusunan KEM PPKF Tahun 2017 telah mengacu pada RKP tahun 2017.

PPKF Tahun 2017 disusun dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian, kompleksitas tantangan yang dihadapi, serta target-target pembangunan yang hendak dicapai sebagaimana tertuang dalam RKP 2017. Oleh karena itu, Pemerintah senantiasa berupaya untuk mewujudkan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas APBN, peningkatan efisiensi pengalokasian anggaran, penguatan daya tahan fiskal, dan pengendalian risiko baik dalam perspektif jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Di tengah tantangan perekonomian global dan domestik, pengelolaan fiskal tahun 2017 juga akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Tantangan tersebut antara lain: (i) terbatasnya ruang fiskal untuk menopang belanja produktif dan prioritas; (ii) penyerapan belanja yang belum sepenuhnya optimal; (iii) pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran; (iv) pengendalian belanja yang bersifat mengikat (mandatory spending); dan (v) pengendalian keseimbangan primer.

Untuk merespon dinamika perekonomian, menghadapi berbagai tantangan dan sekaligus mendukung pencapain target pembangunan maka, pemerintah menetapkan tema Kebijakan Fiskal Tahun 2017 adalah "Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan". Strategi yang akan ditempuh untuk mendukung tema tersebut dilakukan dengan, pertama, meningkatkan kualitas stimulus fiskal baik melalui sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan. Kedua, memantapkan daya tahan fiskal, melalui penyediaan bantalan fiskal dan meningkatkan fleksibilitas dalam pengelolaan fiskal. Ketiga, menjaga kesinambungan fiskal dan mengendalikan risiko dalam jangka menengah dan panjang, melalui pengendalian defisit, rasio utang, dan keseimbangan primer.

Arah dan strategi Kebijakan fiskal yang ditempuh pada tahun 2017 tersebut, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kerangka kebijakan fiskal jangka menengah 2015-2020. Esensi kebijakan fiskal jangka menengah adalah, mendorong agar pengelolaan fiskal senantiasa konsisten mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal, sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah.

Secara umum arah dan strategi dalam prespektif jangka menengah ditempuh melalui 3 (tiga) kebijakan utama. *Pertama*, memberi penekanan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas, yang antara lain difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan kapasitas produksi dan daya saing, peningkatan kualitas dan jangkauan program perlindungan sosial dalam rangka percepatan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, serta penguatan desentralisasi fiskal. *Kedua*, memperlebar ruang fiskal melalui optimalisasi penerimaan perpajakan, mendorong efisiensi dan efektivitas subsidi agar lebih tepat sasaran, dan efisiensi belanja operasional dan non prioritas. *Ketiga*, memperkuat daya tahan dan pengendalian risiko melalui pengendalian defisit dan rasio utang dalam batas *manageable*.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Pada tahun 2017, Pemerintah tetap berusaha untuk terus meningkatkan kinerja perpajakan. Dalam rangka mendukung target pendapatan negara maka pemerintah akan terus melakukan optimalisasi perpajakan. Namun demikian, Pemerintah akan tetap berusaha agar pajak tidak menimbulkan disinsentif bagi keberlangsungan iklim investasi dan dunia usaha.

Pemerintah juga akan terus berupaya untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di tahun 2017 sebagai sumber dana pembangunan, meskipun tantangannya diperkirakan akan sangat berat. Di sisi penerimaan SDA migas, tantangan utama yang harus dihadapi adalah rendahnya harga ICP, yang dikhawatirkan akan berdampak pula pada penurunan kegiatan eksploitasi dan eksplorasi usaha hulu migas. Selanjutnya, tantangan pencapaian target penerimaan SDA nonmigas antara lain rendahnya harga komoditas tambang, kelestarian lingkungan, dan kepatuhan wajib bayar.

Sementara itu, kebijakan belanja negara tahun 2017 akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas belanja negara melalui peningkatkan belanja produktif, dan melakukan efisiensi belanja yang bersifat konsumtif. Arah kebijakan belanja negara tersebut ditujukan untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan nasional. Adapun target pembangunan yang hendak dicapai pada tahun 2017 adalah: mendorong pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3–5,9 persen, menurunkan tingkat pengangguran pada kisaran 5,3–5,6 persen, dan menurunkan tingkat kemiskinan antara 9,5–10,5 persen serta pengurangan kesenjangan ekonomi (rasio gini 0,38).

Secara umum, kebijakan belanja negara tahun 2017 diarahkan antara lain untuk: (1) meningkatkan belanja produktif untuk pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing, percepatan konektivitas nasional melalui sistem transportasi yang terkoneksi dan terintegrasi, dan efisiensi sistem logistik di jalur logistik nasional; (2) mendukung pemantapan reformasi birokrasi untuk terciptanya birokrasi yang efisien agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih berkualitas; (3) meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial dalam rangka mengakselerasi pengurangan pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan; dan (4) penguatan desentralisasi fiskal dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.

Pada tahun 2017 pemerintah akan menerapkan kebijakan pembiayaan yang mendukung prioritas pembangunan, yaitu: (1)

mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas *manageable*; (2) memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif dan menjaga keseimbangan makro ekonomi; (3) mengembangkan dan mengoptimalkan pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan serta meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM; (4) menyempurnakan kualitas perencanaan investasi Pemerintah (5) mendukung perbaikan mekanisme pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/lembaga keuangan internasional; (6) mendukung upaya peningkatan ekspor; (7) membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas; serta (8) mendukung program peningkatan akses terhadap pendidikan dan penyediaan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Demikian Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2017 yang telah kami susun dengan prinsip kehati-hatian sebagai langkah awal penyiapan penyusunan RAPBN 2017. Selanjutnya kami mengharapkan dukungan, masukan, dan kerjasama seluruh anggota Dewan yang terhormat dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tersebut.

Semoga ALLAH SWT senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya bagi kita semua untuk dapat melaksanakan tugas dan amanah seluruh rakyat Indonesia dalam upaya kita menjalankan roda pembangunan menuju bangsa dan negara yang lebih maju, adil, dan sejahtera.

Wassalammu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh.